

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, Indonesia secara nasional telah mencapai tingkat swasembada beras sebesar 139,12%. Namun, ketimpangan antarprovinsi masih terjadi, dengan beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya yang tidak swasembada dan sangat bergantung pada distribusi dari wilayah lain.
2. Impor beras Indonesia mengalami fluktuasi selama periode 2018–2023. Meskipun produksi beras menunjukkan surplus pada beberapa tahun, impor tetap dilakukan, bahkan mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 sebesar 3,06 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa impor tidak hanya ditujukan untuk menutupi defisit, tetapi juga sebagai strategi menjaga cadangan dan stabilitas harga beras nasional.
3. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan penurunan jumlah provinsi yang masuk kategori rentan rawan pangan. Namun, masih terdapat beberapa provinsi dalam kategori tersebut pada tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa ketahanan pangan belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat swasembada beras dan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2023 ($r = 0,471$), namun tidak mutlak. Swasembada berkontribusi terhadap ketahanan pangan, tetapi bukan satu-satunya faktor, karena ketahanan pangan bersifat multidimensional.

5. Berdasarkan hasil regresi linier berganda *double-log*, variabel luas panen, produksi, jumlah penduduk, dan nilai tukar petani (NTP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks ketahanan pangan nasional. Sementara itu variabel PDRB per kapita tidak berpengaruh signifikan. Model ini mampu menjelaskan variabilitas ketahanan pangan sebesar 81,6%.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penguatan distribusi dan stabilisasi pasokan pangan

Pemerintah perlu membangun jaringan logistik modern, memperbesar cadangan beras pemerintah (CBP), serta memperkuat peran Bulog dalam operasi pasar agar harga stabil di tingkat petani dan konsumen.

2. Perbaikan tata niaga beras

Rantai distribusi perlu dipersingkat dengan memperkuat koperasi atau BUMDes sebagai penyalur langsung, memanfaatkan marketplace pertanian, dan menegakkan harga pembelian gabah (HPP) secara konsisten.

3. Peningkatan produktivitas pertanian

Produktivitas dapat ditingkatkan melalui mekanisasi pertanian, penggunaan varietas unggul tahan iklim, dan penyuluhan digital untuk mempercepat adopsi teknologi budidaya.

4. Penyediaan subsidi input pertanian

Subsidi pupuk, benih unggul, serta kredit usaha tani berbunga rendah perlu diperluas dan dipastikan tepat sasaran agar biaya produksi petani lebih ringan.

5. Pembangunan infrastruktur logistik pangan

Pemerintah harus membangun jalan usaha tani, pelabuhan logistik antar pulau, dan gudang berpendingin untuk menekan biaya distribusi dan menjaga kualitas beras.

6. Reformasi kebijakan harga beras

Penetapan harga dasar gabah dan harga eceran tertinggi beras perlu ditegakkan, serta mekanisme lelang beras digital diperkenalkan agar harga lebih adil dan transparan.

7. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP dapat ditingkatkan dengan menekan biaya produksi, menjaga harga gabah tetap stabil melalui penyerapan Bulog/koperasi, serta memberikan insentif seperti asuransi gagal panen.